

ABSTRAK

Arfan Fadillah, 2025. *Network Governance dalam Optimalisasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Makassar* (dibimbing oleh Fatmawati dan Nur Khaerah).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *network governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Permasalahan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan volume sampah, tetapi juga dengan kompleksitas hubungan antaraktor, yaitu pemerintah, sektor swasta, bank sampah, komunitas lingkungan, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan *network governance* digunakan untuk mengkaji pola interaksi, koordinasi, dan kolaborasi antaraktor dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, pengelola bank sampah, sektor swasta, komunitas lingkungan, dan masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *network governance* telah berjalan, namun belum optimal. Kepercayaan antaraktor telah terbangun melalui kerja sama dan regulasi, tetapi jaringan masih bergantung pada pemerintah sebagai *lead organization*. Komunikasi dan koordinasi telah dilakukan secara formal dan informal, namun belum rutin. Konsensus tujuan telah terbentuk dalam visi pengelolaan sampah, namun perumusan kebijakan masih bersifat *top-down* sehingga peran aktor non-pemerintah lebih dominan pada tahap implementasi. Selain itu, terdapat ketimpangan kompetensi sumber daya manusia, kelembagaan, serta sarana prasarana, khususnya pada bank sampah dan komunitas lingkungan. Faktor pendukung penerapan *network governance* meliputi dukungan sumber daya, kewenangan formal pemerintah, komitmen aktor, dan tujuan bersama. Adapun faktor penghambat meliputi ketimpangan kekuasaan, koordinasi yang tidak rutin, ketergantungan tinggi aktor non-pemerintah terhadap pemerintah, serta keterbatasan kompetensi aktor non-pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aktor non-pemerintah, koordinasi yang berkelanjutan, serta perluasan partisipasi dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan agar jaringan pengelolaan sampah lebih efektif dan inklusif.

Kata Kunci: *Network Governance*, Kebijakan Publik, Pengelolaan Sampah, Kota Makassar